

Indonesia dalam Pusaran Geopolitik Dunia



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

13 Maret 2026

INDONESIA DALAM PUSARAN GEOPOLITIK DUNIA

1. Pendahuluan

Indonesia memasuki pertengahan dekade 2020-an dalam posisi yang sangat menarik sekaligus sangat menantang. Di satu sisi, ekonomi Indonesia masih relatif tangguh: BPS mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar **5,11 persen**, sementara neraca perdagangan barang sepanjang 2025 tetap mencatat surplus **US\$41,05 miliar**. Bank Dunia juga menilai ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global dan menyoroti bahwa ekonomi digital Indonesia masih yang **terbesar di ASEAN** pada 2025. Namun di sisi lain, tekanan geopolitik global semakin terasa langsung pada Indonesia, dari lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, negosiasi dagang yang makin keras, hingga penataan ulang rantai pasok dan keamanan Indo-Pasifik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, ketika kita berbicara tentang “Indonesia dalam pusaran geopolitik dunia,” yang dimaksud bukan sekadar bahwa Indonesia terkena dampak dari peristiwa luar negeri. Yang lebih penting adalah bahwa Indonesia kini berada di titik temu berbagai arus besar dunia: kompetisi kekuatan besar, fragmentasi geoekonomi, transisi energi, digitalisasi, reformasi tata kelola global, dan ketegangan keamanan maritim. Semua arus itu tidak lagi berada jauh di luar batas negara, melainkan sudah masuk ke dalam soal-soal sangat domestik: kurs rupiah, subsidi energi, pilihan investasi, keamanan laut, perdagangan, industrialisasi, dan stabilitas politik. Dalam arti ini, geopolitik bukan sesuatu yang berada “di luar” Indonesia; ia sudah menjadi bagian dari kehidupan negara dan kebijakan sehari-hari. ([Reuters](#))

Di tengah situasi seperti itu, pertanyaan besar bagi Indonesia bukan sekadar bagaimana bertahan, melainkan bagaimana memanfaatkan turbulensi global itu untuk memperkuat posisi nasional. Indonesia harus menjaga kedaulatan dan ruang kebijakan, tetapi juga tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama multilateral. Ia harus mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, tetapi juga membuatnya relevan dalam dunia yang semakin multipolar dan semakin transaksional. Ia harus tetap setia pada ASEAN, tetapi juga menavigasi BRICS, G20, Indo-Pasifik, dan Global South. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa memilih untuk keluar dari pusaran geopolitik dunia; yang bisa dilakukan adalah belajar bergerak lebih cerdas di dalamnya.

2. Mengapa Indonesia Penting dalam Politik Dunia?

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia memiliki bobot geopolitik yang jauh lebih besar daripada sekadar ukuran formalnya sebagai negara berkembang besar. Pertama, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan yang masih cukup stabil dibanding banyak negara lain, dan dengan fondasi ekspor, investasi, dan pasar domestik yang besar. Kedua, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang luar biasa karena berada di simpul antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta menguasai jalur-jalur laut penting bagi perdagangan dunia. Ketiga, Indonesia adalah demokrasi besar, negara kepulauan, anggota G20, anggota baru BRICS, dan salah satu suara paling penting dari Global South. Kombinasi inilah yang membuat Indonesia selalu diperhitungkan, baik oleh kekuatan besar maupun oleh negara-negara berkembang lainnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya menyadari sepenuhnya bobot ini. Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025–2029, visi Kemlu dirumuskan sebagai upaya “memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Dokumen yang sama menempatkan tiga tujuan yang sangat relevan: menjaga integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional, meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dan membawa manfaat konkret, serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global sebagai *positive force* dan aktor kunci. Rumusan ini penting, karena ia menunjukkan bahwa bagi pemerintah Indonesia, politik luar negeri bukan pelengkap pembangunan, melainkan instrumen inti untuk mempertahankan kedaulatan, memperkuat ekonomi, dan memperbesar pengaruh.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam geopolitik dunia seharusnya tidak dibaca sebagai posisi "negara penengah yang pasif," tetapi sebagai posisi negara yang berusaha mengubah ukuran, lokasi, dan reputasinya menjadi pengaruh. Tantangannya tentu besar. Pengaruh tidak datang hanya karena populasi atau geografi. Ia datang bila negara mampu menerjemahkan potensi itu ke dalam forum, aturan, kesepakatan ekonomi, jaringan keamanan, dan kapasitas domestik yang mendukung. Indonesia sedang berusaha melakukan itu—dan keberhasilannya belum final, tetapi arahnya cukup jelas.

3. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Dunia yang Tidak Lagi Sederhana

Politik luar negeri bebas aktif telah lama menjadi kerangka dasar diplomasi Indonesia. Tetapi dalam dunia yang semakin multipolar, makna bebas aktif menjadi lebih rumit. "Bebas" tidak bisa lagi diartikan sekadar tidak ikut blok Perang Dingin, karena blok-blok baru hari ini tidak selalu formal. Mereka hadir dalam bentuk jaringan pertahanan, ketergantungan teknologi, rantai pasok, platform digital, pembiayaan, dan standar perdagangan. "Aktif" juga tidak cukup berarti ikut berbicara di forum multilateral. Aktif hari ini berarti mampu membentuk agenda, menghubungkan berbagai pihak, dan menjaga ruang manuver nasional di tengah tekanan yang makin besar.

Dokumen resmi Kemlu 2025–2029 menunjukkan bahwa pemerintah ingin menafsirkan bebas aktif secara lebih operasional. Dalam penjelasan tentang posisi Indonesia di BRICS, renstra Kemlu menyatakan bahwa Indonesia ingin memperkuat perannya sebagai *bridge-builder*, mengedepankan dialog yang inklusif, memperkuat multilateralisme, dan menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang. Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga dibaca sebagai langkah untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global dan memajukan kepentingan Global South. Dengan kata lain, bebas aktif kini dipadukan dengan peran sebagai penghubung dan pengusung reformasi tata kelola global.

Tetapi perlu dicatat bahwa bebas aktif modern tidak identik dengan netralitas pasif. Pada Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan memperluas kemitraan pertahanan yang ada dan meningkatkan penanganan isu-isu strategis yang berdampak pada kedaulatan, termasuk keamanan maritim, keselamatan jalur laut, dan perikanan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong penyelesaian *code of conduct* Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok sambil memprioritaskan sentralitas ASEAN. Ini menunjukkan bahwa bebas aktif dalam praktiknya sekarang berarti menghindari subordinasi pada satu kekuatan, tetapi bukan berarti menghindari tindakan. ([Reuters](#))

4. ASEAN dan Indo-Pasifik: Lingkaran Pertama Geopolitik Indonesia

Dalam peta geopolitik Indonesia, ASEAN tetap merupakan lingkaran terdekat dan paling menentukan. Hal ini bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi karena ASEAN masih menjadi wadah utama bagi Indonesia untuk mengelola lingkungan strategis regional tanpa harus terjebak dalam logika aliansi keras. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) 2019 menegaskan bahwa ASEAN hendak mempertahankan peran sentralnya dalam membentuk arsitektur ekonomi dan keamanan kawasan yang lebih luas, dan menjadikan *ASEAN Centrality* sebagai

prinsip dasar kerja sama Indo-Pasifik. Dokumen itu secara eksplisit menyebutkan bahwa ASEAN ingin menjadi pemimpin kolektif dalam membentuk kerja sama yang lebih erat, menghindari logika *zero-sum game*, dan menjaga peran sebagai *honest broker* di tengah kepentingan yang saling bersaing.

Bagi Indonesia, AOIP bukan sekadar dokumen ASEAN; ia adalah ekspresi dari kepentingan strategis Indonesia sendiri. Renstra Kemlu 2025–2029 menyatakan bahwa AOIP diluncurkan sebagai *grand design* kerja sama yang konkret dan inklusif, sebagai jawaban atas meningkatnya rivalitas di kawasan Indo-Pasifik. Dokumen itu juga menegaskan bahwa di bawah keketuaan Indonesia, AOIP menjadi rujukan utama kerja sama dan kendaraan bagi kolaborasi yang inklusif dan konkret. Ini penting karena memperlihatkan bahwa Indonesia ingin mencegah Indo-Pasifik berubah menjadi istilah yang sepenuhnya didefinisikan oleh kekuatan besar luar kawasan. Indonesia menginginkan Indo-Pasifik yang diikat oleh sentralitas ASEAN, hukum internasional, dan kolaborasi praktis.

Namun, sentralitas ASEAN hari ini jelas berada di bawah tekanan. Minilateralisme keamanan, persaingan AS–Tiongkok, isu Laut Cina Selatan, dan perluasan jejaring pertahanan di luar mekanisme ASEAN menguji kemampuan ASEAN untuk tetap menjadi pusat. Justru karena itulah Indonesia terus menegaskan pentingnya sentralitas ASEAN. Sikap ini terlihat dalam pernyataan Menlu Sugiono pada Januari 2025, dan juga dalam berbagai komunikasi bilateral Indonesia dengan mitra seperti Australia, di mana Indo-Pasifik yang damai, stabil, makmur, dan *rules-based* dengan ASEAN di pusatnya terus ditekankan. Bagi Indonesia, tanpa ASEAN yang relevan, ruang gerak diplomatiknya akan menjadi lebih sempit dan tekanan untuk memilih kubu akan menjadi lebih kuat. ([Reuters](#))

5. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok: Tantangan Utama Abad Ini

Tidak ada cara membahas geopolitik Indonesia hari ini tanpa menempatkan rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok sebagai variabel

utama. Rivalitas ini bukan hanya soal perang dagang atau isu Taiwan. Ia telah menjalar ke teknologi, semikonduktor, investasi, keamanan laut, infrastruktur, mineral kritis, standar digital, hingga pengaruh normatif dalam lembaga-lembaga global. Bagi Indonesia, persoalannya bukan apakah rivalitas itu nyata—ia sangat nyata—melainkan bagaimana menjaga agar Indonesia tidak menjadi sekadar arena perebutan pengaruh atau terpaksa membuat pilihan yang mempersempit kepentingannya sendiri. ([Reuters](#))

China sangat penting bagi Indonesia dari sisi ekonomi dan strategis. Dalam perdagangan, data BPS yang dirilis awal 2026 menunjukkan China tetap menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia pada 2025, sementara dalam geopolitik regional pengaruh ekonomi China juga masih dinilai paling dominan di Asia Tenggara oleh survei ISEAS 2025. Di saat yang sama, BKPM mencatat adanya komitmen investasi baru bernilai **US\$10,07 miliar** saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Tiongkok. Artinya, hubungan Indonesia–Tiongkok bukan relasi pinggir, melainkan salah satu poros utama ekonomi dan geopolitik Indonesia. ([Antara News](#))

Amerika Serikat, di sisi lain, tetap sangat penting sebagai pasar, aktor keamanan, dan pembentuk aturan. USTR mencatat bahwa total perdagangan barang AS–Indonesia pada 2025 mencapai **US\$45,8 miliar**, dengan defisit AS terhadap Indonesia sekitar **US\$23,7 miliar**. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana hubungan itu kini semakin sarat dimensi strategis. Dalam *Fact Sheet* Februari 2026, Gedung Putih menyatakan bahwa kesepakatan dagang terbaru dengan Indonesia mencakup penghapusan tarif Indonesia atas lebih dari 99% produk AS, penanganan hambatan nontarif dan digital trade, kerja sama ketahanan rantai pasok, serta komitmen pembelian energi AS sekitar **US\$15 miliar**. Dengan demikian, hubungan Indonesia–AS kini bukan lagi sekadar ekspor-impor biasa, tetapi juga arena negosiasi pengaruh atas standar, pasar, teknologi, dan keamanan ekonomi. ([United States Trade Representative](#))

Tantangan Indonesia adalah menjaga agar hubungan dengan China tetap produktif tanpa jatuh ke ketergantungan yang terlalu besar, dan menjaga hubungan dengan Amerika Serikat tetap terbuka tanpa membiarkannya berubah menjadi subordinasi regulatif atau politik. Di sinilah diplomasi Indonesia bergerak sebagai *hedging*: mendiversifikasi mitra, membuka banyak kanal, dan berusaha mempertahankan otonomi strategis. Masalahnya, *hedging* menjadi semakin sulit ketika kedua kutub besar semakin sering meminta penyesuaian konkret—entah pada isu data, mineral kritis, keamanan maritim, atau perjanjian perdagangan. ([United States Trade Representative](#))

6. Geoekonomi: Ketika Dagang, Investasi, dan Data Menjadi Alat Pengaruh

Salah satu perubahan terbesar dalam geopolitik kontemporer adalah bahwa ekonomi bukan lagi sekadar latar belakang, melainkan medan utama kontestasi. Indonesia mengalami hal ini secara sangat langsung. Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,0% pada sembilan bulan pertama 2025 dan masih ditopang investasi serta net ekspor. Pada saat yang sama, Bank Dunia juga menegaskan bahwa ekonomi digital Indonesia tetap yang terbesar di ASEAN, tetapi kualitas infrastruktur digital, kecepatan internet, dan kapasitas data center masih perlu diperkuat. Ini berarti masa depan posisi Indonesia di dunia tidak hanya ditentukan oleh komoditas dan manufaktur, tetapi juga oleh jaringan digital, kompetisi teknologi, dan aturan data. ([World Bank](#))

Fakta bahwa perdagangan Indonesia masih menghasilkan surplus besar tidak berarti semua masalah selesai. BPS mencatat surplus perdagangan barang 2025 sebesar US\$41,05 miliar, tetapi sumber daya, harga komoditas, dan permintaan eksternal masih sangat menentukan. Karena itu, geoeconomics Indonesia harus dibaca secara ganda: Indonesia tampak kuat saat harga komoditas dan ekspor menopang neraca, tetapi tetap rentan ketika rantai pasok global terganggu, tarif berubah, atau pasar utama melambat. Kebijakan dagang AS terhadap Indonesia pada

2025–2026 menunjukkan bahwa pasar dapat dengan cepat berubah menjadi instrumen tekanan geopolitik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

ASEAN sendiri telah mengakui perubahan ini secara terbuka. Pada Agustus 2025, *ASEAN Geoeconomics Task Force* berkumpul di Bogor untuk membahas ketegangan geoekonomi dan kebijakan tarif unilateral. Bahkan, ASEAN merilis *ASEAN Geoeconomics Report 2025* untuk menilai bagaimana kawasan dapat membangun agenda di tengah agenda global baru. Ini menunjukkan bahwa geoeconomics bukan lagi isu akademik, tetapi persoalan resmi kawasan. Bagi Indonesia, perkembangan ini sangat penting karena berarti diplomasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dari keamanan, industri, dan pengaruh regional. ([ASEAN](#))

Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi unik. Ia cukup besar untuk menarik investor dan pasar dari berbagai pihak, tetapi belum cukup dominan untuk mendikte aturan sendiri. Karena itu, strategi yang paling realistis adalah menggunakan ukuran pasar, posisi regional, dan sumber daya strategis untuk memperbesar posisi tawar, sambil tetap memperkuat fondasi domestik—dari produktivitas hingga infrastruktur digital. Tanpa fondasi domestik yang kuat, geoekonomi hanya akan menghasilkan ketergantungan baru dalam bentuk yang lebih modern. ([World Bank](#))

7. BRICS, Global South, dan Upaya Memperluas Ruang Tawar

Masuknya Indonesia ke BRICS pada Januari 2025 merupakan salah satu tanda paling jelas bahwa politik luar negeri Indonesia sedang bergerak untuk memperluas ruang tawar globalnya. Pemerintah Brasil menyatakan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah keanggotaannya disetujui pada KTT Johannesburg 2023 dan diformalkan setelah terbentuknya pemerintahan baru Indonesia. Dalam Renstra Kemlu 2025–2029, keanggotaan ini dijelaskan sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global, memajukan kepentingan negara-negara berkembang, mendorong tatanan global yang lebih representatif, dan mempertegas Indonesia sebagai *middle*

power yang berorientasi pada solusi global. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Keanggotaan itu bukan simbol kosong. Pada Maret 2025, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia akan bergabung dengan **New Development Bank (NDB)** milik BRICS. Reuters melaporkan bahwa langkah itu dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, dan bahwa NDB tertarik bekerja sama pada sektor seperti energi terbarukan, biodiesel, dan pengembangan teknologi. Secara geopolitik, keputusan ini menunjukkan dua hal. Pertama, Indonesia ingin memperluas akses pembiayaan dan kemitraan di luar institusi keuangan internasional tradisional. Kedua, Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai bagian dari Global South tanpa harus meninggalkan forum-forum lama seperti G20, ASEAN, atau WTO. ([Reuters](#))

Namun BRICS juga menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan BRICS sebagai kanal reformasi tata kelola global tanpa dianggap bergeser terlalu jauh dari mitra Barat dan tradisi non-bloknya? Sejauh mana BRICS benar-benar akan menjadi platform yang berguna bagi kepentingan Indonesia, bukan sekadar panggung simbolik? Renstra Kemlu tampaknya menjawab dengan menekankan fungsi BRICS sebagai ruang *bridge-building*, bukan sebagai pengganti total forum-forum lain. Dengan demikian, bagi Indonesia, BRICS tampaknya dibaca bukan sebagai aliansi ideologis, melainkan sebagai instrumen diversifikasi geopolitik.

Dalam pengertian yang lebih luas, langkah Indonesia ke BRICS memperlihatkan bahwa Jakarta ingin hadir di banyak lingkaran sekaligus: ASEAN, G20, Indo-Pasifik, Global South, dan reformasi multilateral. Ini adalah strategi yang ambisius, tetapi juga sejalan dengan realitas dunia multipolar. Negara seperti Indonesia akan kehilangan banyak peluang bila hanya mengandalkan satu lingkaran diplomatik saja. Tantangannya tentu adalah menjaga konsistensi dan kredibilitas di semua lingkaran itu sekaligus. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

8. Dimensi Keamanan: Dari Laut Cina Selatan hingga Modernisasi Militer

Pusaran geopolitik dunia juga semakin terasa di sektor keamanan. Indonesia sejak awal 2025 telah menandai bahwa isu kedaulatan, keamanan maritim, keselamatan jalur laut, dan perikanan akan mendapat perhatian lebih besar. Pernyataan Menlu Sugiono pada Januari 2025 menunjukkan bahwa pemerintah melihat keamanan maritim sebagai bagian langsung dari respons terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi kedaulatan Indonesia. Laut Cina Selatan menjadi salah satu contohnya, karena Indonesia tetap mendorong penyelesaian *code of conduct* ASEAN–Tiongkok sambil menegaskan sentralitas ASEAN. ([Reuters](#))

Dalam praktik yang lebih keras, Indonesia juga mulai memperlihatkan penguatan postur. Reuters melaporkan pada 9 Maret 2026 bahwa Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi sistem rudal **BrahMos** dari India. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan, akuisisi ini merupakan bagian dari modernisasi alutsista dan kemampuan pertahanan, terutama di sektor maritim. Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa di tengah retorika bebas aktif, Indonesia juga memahami kebutuhan untuk memperkuat daya tangkal di lapangan. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya berbasis diplomasi normatif; ia juga mulai ditopang oleh langkah modernisasi pertahanan yang lebih konkret. ([Reuters](#))

Beberapa hari setelah itu, Reuters juga melaporkan bahwa Indonesia dan Australia berencana memperluas kerja sama keamanan mereka dengan melibatkan Jepang dan Papua Nugini. Jika langkah ini berjalan, maka Indonesia akan menjadi bagian dari format kerja sama keamanan yang lebih berlapis di Indo-Pasifik. Hal ini menarik karena menunjukkan satu kecenderungan baru: Indonesia tetap menekankan ASEAN dan sentralitas kawasan, tetapi pada saat yang sama tidak menutup diri dari

jaringan kerja sama keamanan yang lebih sempit dan lebih operasional bila itu dianggap sesuai kepentingannya. ([Reuters](#))

Di titik ini terlihat jelas bahwa kebijakan keamanan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih realistis. Indonesia tampaknya tidak ingin menjadi negara garis depan dalam rivalitas blok, tetapi juga tidak ingin terlihat lemah atau pasif. Karena itu, strategi yang muncul adalah kombinasi antara diplomasi kawasan, modernisasi pertahanan maritim, dan diversifikasi kemitraan keamanan. Ini masuk akal untuk negara kepulauan besar yang berada di persilangan jalur laut dan rivalitas kekuatan besar. ([Reuters](#))

9. Energi dan Komoditas: Ketika Konflik Jauh Menjadi Masalah Domestik

Geopolitik dunia juga terlihat sangat nyata pada sektor energi dan komoditas Indonesia. Reuters melaporkan pada Maret 2026 bahwa pejabat ekonomi senior Indonesia memperingatkan harga minyak global yang bertahan tinggi akibat perang di Timur Tengah dapat membuat defisit anggaran menembus batas hukum 3% dari PDB. Dalam skenario resmi pemerintah, bila harga minyak rata-rata mencapai USD 86, pertumbuhan mungkin masih terjaga sekitar 5,3%, tetapi defisit akan naik; pada skenario USD 97–115 per barel, pertumbuhan melambat dan defisit dapat meningkat hingga lebih dari 4% PDB. Ini menunjukkan bahwa gejolak geopolitik di luar kawasan dapat langsung berubah menjadi masalah fiskal dan ekonomi domestik di Indonesia. ([Reuters](#))

Kerentanan itu dipertegas oleh fakta bahwa Indonesia, meskipun kaya sumber daya, tetap sangat sensitif terhadap harga energi. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa APBN 2026 telah mengalokasikan **Rp381,3 triliun** untuk subsidi dan kompensasi energi, dengan asumsi minyak **USD 70 per barel**. Ketika harga aktual melonjak di atas asumsi, negara harus memilih antara memperbesar subsidi, menghemat anggaran di pos lain, atau membiarkan tekanan lebih besar diteruskan ke masyarakat. Ini adalah contoh paling nyata bahwa dalam dunia

sekarang, geopolitik energi bukan isu eksternal, melainkan soal keseharian negara. ([Reuters](#))

Pada saat yang sama, Indonesia juga adalah kekuatan komoditas dunia—palm oil, nikel, batu bara, tembaga, dan lain-lain. Reuters melaporkan bahwa dalam simulasi pemerintah, pajak tambahan atas komoditas seperti sawit, nikel, emas, dan tembaga bahkan dipertimbangkan sebagai salah satu cara meredam tekanan fiskal dari lonjakan harga minyak. Ini menunjukkan bahwa komoditas bagi Indonesia bukan hanya sumber devisa, tetapi juga *shock absorber* geopolitik. Namun tentu saja, ketergantungan seperti ini juga rawan, karena membuat stabilitas fiskal dan eksternal Indonesia sangat terkait dengan volatilitas harga global dan permintaan internasional. ([Reuters](#))

Karena itu, energi dan komoditas memperlihatkan wajah paling keras dari pusaran geopolitik: konflik di satu kawasan dapat menaikkan minyak, melemahkan rupiah, membebani APBN, lalu memaksa Indonesia menata ulang pajak, subsidi, dan prioritas belanja. Inilah alasan mengapa strategi hilirisasi, diversifikasi pasar, dan transisi energi menjadi penting bukan hanya dari sudut ekonomi, tetapi dari sudut keamanan nasional. ([Reuters](#))

10. Tantangan Domestik: Agar Politik Luar Negeri Tidak Kehilangan Fondasi

Sering kali pembicaraan tentang geopolitik terlalu fokus pada luar negeri dan melupakan bahwa daya tahan sebuah negara dalam pusaran dunia sangat ditentukan oleh fondasi domestiknya. Indonesia memang tumbuh 5,11% pada 2025, tetapi Reuters mencatat pertumbuhan itu tetap di bawah target pemerintah dan dibayangi kekhawatiran pasar atas konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor. Bank Dunia juga mengingatkan bahwa walaupun ekonomi stabil, pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan, banyak pekerjaan baru berada di sektor bernilai tambah rendah, dan upah riil menurun dalam periode 2018–2024. Artinya, Indonesia mungkin terlihat cukup kuat dari

luar, tetapi masih perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan di dalam negeri agar mampu menopang ambisi geopolitiknya. ([Reuters](#))

Masalah ini penting karena negara yang ingin memainkan peran geopolitik lebih besar harus punya kapasitas ekonomi, fiskal, dan institusional yang cukup dalam. Jika pertumbuhan melambat, investor ragu, nilai tukar rapuh, dan ketimpangan kerja membesar, maka kemampuan negara untuk bersikap luwes di luar negeri akan ikut menyempit. Sebaliknya, semakin kuat fondasi domestik Indonesia—dari digital infrastructure hingga industri bernilai tinggi—semakin besar pula ruang bagi Jakarta untuk menjalankan diplomasi yang benar-benar otonom. Dalam pengertian ini, geopolitik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi domestik. ([World Bank](#))

Inilah sebabnya berbagai dokumen resmi Indonesia kini sangat menekankan diplomasi ekonomi, ketahanan nasional, kemandirian bangsa, dan manfaat konkret. Politik luar negeri tidak lagi dipresentasikan hanya sebagai soal citra atau pengaruh, tetapi sebagai sarana langsung untuk memperkuat pembangunan nasional. Bila dipahami demikian, maka keberhasilan Indonesia di panggung dunia akan sangat bergantung pada seberapa baik ia memperbaiki produktivitas, kualitas pekerjaan, ketahanan energi, teknologi digital, dan daya saing industrinya sendiri.

11. Pilihan Strategis Indonesia ke Depan

Melihat seluruh dinamika di atas, Indonesia tampaknya perlu bergerak pada beberapa garis strategi sekaligus. Pertama, menjaga **otonomi strategis**, bukan dengan menjauh dari dunia, tetapi dengan memperluas pilihan. Ini berarti memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, Uni Eropa, BRICS, dan Global South secara bersamaan, tanpa membiarkan satu hubungan mengunci seluruh ruang gerak nasional. Keanggotaan di BRICS, hubungan dagang dengan AS, kedekatan ekonomi dengan China, dan penekanan pada ASEAN

sebenarnya sudah menunjukkan arah ini. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kedua, Indonesia perlu terus menjadikan **ASEAN sebagai jangkar**, bukan karena ASEAN sempurna, tetapi karena tanpa ASEAN, tekanan untuk memilih kubu akan jauh lebih besar. AOIP tetap relevan sebagai kerangka normatif, tetapi tantangan ke depan adalah menerjemahkan sentralitas ASEAN ke proyek dan hasil yang lebih nyata, terutama dalam maritim, supply chains, digital economy, dan stabilitas kawasan. Bila ASEAN hanya menjadi slogan diplomatik, maka Indonesia akan kehilangan salah satu instrumen terpentingnya untuk mengelola tekanan Indo-Pasifik.

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat **geoeconomics domestik**: hilirisasi yang sungguh menghasilkan nilai tambah, digital infrastructure yang berkualitas, iklim investasi yang kredibel, dan diversifikasi pasar ekspor. Bank Dunia secara khusus menyoroti pentingnya digitalization, competition, dan business environment agar Indonesia bisa bergerak ke pekerjaan bernilai lebih tinggi dan memaksimalkan keuntungan dari ekonomi digital terbesarnya di ASEAN. Tanpa fondasi seperti ini, Indonesia akan tetap besar sebagai pasar, tetapi tidak cukup kuat sebagai pembentuk aturan. ([World Bank](#))

Keempat, Indonesia perlu menyeimbangkan **diplomasi normatif** dengan **kapasitas keras**. Akhir-akhir ini tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat: modernisasi pertahanan maritim, kerja sama keamanan yang lebih luas, dan perhatian yang lebih besar pada isu kedaulatan. Dalam dunia yang makin keras, diplomasi tanpa kapasitas akan dipandang lemah; tetapi kapasitas tanpa arah diplomatik akan mudah menyeret Indonesia ke logika blok yang justru ingin dihindari. Karena itu, kunci Indonesia tetap pada keseimbangan: cukup kuat untuk menjaga kepentingan, cukup luwes untuk tetap menjadi penghubung. ([Reuters](#))

12. Penutup

Indonesia hari ini benar-benar berada dalam pusaran geopolitik dunia. Pusaran itu datang dari mana-mana: rivalitas kekuatan besar, tekanan dagang, perubahan rantai pasok, kebutuhan energi, gejolak harga minyak, persaingan teknologi, keamanan maritim, hingga tuntutan reformasi tata kelola global. Tetapi berada dalam pusaran tidak selalu berarti menjadi korban. Dalam banyak hal, justru posisi Indonesia memberi peluang besar untuk memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting daripada sebelumnya. Dengan ekonomi yang masih tumbuh, surplus perdagangan yang besar, posisi digital yang menonjol di ASEAN, keanggotaan dalam forum-forum penting, dan geografi yang sangat strategis, Indonesia memiliki bahan mentah geopolitik yang tidak kecil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun bahan mentah itu hanya akan menjadi kekuatan bila ditata dengan tepat. Indonesia perlu terus menegaskan visi luar negerinya: menjaga kedaulatan, memperkuat diplomasi ekonomi, dan menjadi *positive force* di kawasan dan global. Ia perlu terus merawat ASEAN sambil memperluas jangkauan ke BRICS dan Global South. Ia perlu membuka diri pada perdagangan dan investasi, tetapi tanpa menyerahkan terlalu banyak ruang kebijakan. Ia perlu modernisasi pertahanan, tetapi tanpa kehilangan orientasi bebas aktif. Singkatnya, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara dunia luar dan kepentingan nasional, melainkan **menjadikan keterlibatan global itu sendiri sebagai sarana memperkuat kepentingan nasional.**

Bila Indonesia berhasil melakukan itu, maka "pusaran geopolitik dunia" tidak akan menjadi sekadar ancaman, melainkan lingkungan keras yang justru menegaskan kedewasaan strategis Indonesia. Tetapi bila Indonesia gagal memperkuat fondasi domestiknya, gagal menjaga keseimbangan diplomatiknya, atau gagal membaca perubahan dunia dengan cukup cepat, maka pusaran itu dapat berubah menjadi tekanan yang mengikis kedaulatan, mempersempit pilihan, dan menurunkan daya tawar. Dengan kata lain, masa depan posisi Indonesia di dunia tidak ditentukan hanya oleh apa yang dilakukan negara lain, tetapi juga oleh seberapa

cerdas Indonesia menata dirinya sendiri di tengah perubahan global yang semakin cepat dan semakin tidak pasti. ([World Bank](#))

Perkembangan terbaru yang paling relevan dengan tema ini saya letakkan di bawah untuk memudahkan penelusuran sumber berita utama:

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

Berikut saya susunkan **Glosarium** dan **Daftar Pustaka APA 7** untuk topik **“Indonesia dalam Pusaran Geopolitik Dunia”** - difokuskan pada istilah yang paling langsung membantu pembaca memahami posisi Indonesia di tengah ASEAN, Indo-Pasifik, rivalitas kekuatan besar, geoekonomi, serta perluasan peran Indonesia di Global South. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Glosarium

1. Politik luar negeri bebas aktif

Prinsip dasar diplomasi Indonesia yang menekankan kemandirian dalam menentukan sikap internasional tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, sambil tetap aktif berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan tata kelola global. Dalam dokumen perencanaan 2025–2029, prinsip

ini diterjemahkan ke dalam agenda kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan peningkatan pengaruh Indonesia di tingkat kawasan maupun global. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

2. Otonomi strategis

Kemampuan negara menjaga ruang kebijakan dan kebebasan manuvernya di tengah tekanan dari kekuatan besar, pasar global, dan institusi internasional. Dalam konteks Indonesia, otonomi strategis tampak dalam upaya menjaga hubungan dengan banyak mitra sekaligus tanpa terseret ke satu kubu tunggal. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

3. Middle power

Negara yang bukan kekuatan super, tetapi memiliki kapasitas diplomatik, ekonomi, dan institusional yang cukup untuk membentuk agenda, menjembatani pihak-pihak yang berseberangan, dan memengaruhi tata kelola regional atau global. Dokumen resmi Kemlu memosisikan Indonesia sebagai *positive force* dan aktor kunci yang berupaya menjadi *bridge-builder*. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

4. Bridge-builder

Peran diplomatik sebagai penghubung antara kelompok negara atau posisi politik yang berbeda. Dalam penjelasan resmi terkait BRICS dan arah diplomasi Indonesia, peran ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjembatani negara maju dan negara berkembang, serta memperkuat dialog yang inklusif. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

5. ASEAN Centrality

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap berada di pusat arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. AOIP menegaskan sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar kerja sama kawasan. ([ASEAN](#))

6. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Dokumen ASEAN tahun 2019 yang mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, serta menegaskan keterbukaan, inklusivitas, dan sentralitas ASEAN. Bagi Indonesia, AOIP menjadi salah satu instrumen penting untuk mengelola tekanan geopolitik Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

7. Indo-Pasifik

Ruang strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, kini menjadi arena utama persaingan ekonomi, keamanan, teknologi, dan pengaruh politik dunia. Dalam pendekatan ASEAN dan Indonesia, kawasan ini idealnya dikelola melalui kerja sama yang inklusif dan berbasis aturan. ([ASEAN](#))

8. Geoekonomi (geoeconomics)

Penggunaan perdagangan, investasi, tarif, teknologi, pembiayaan, dan data sebagai instrumen pengaruh strategis. Pembentukan *ASEAN Geoeconomics Task Force* pada 2025 menunjukkan bahwa geoekonomi kini diperlakukan sebagai agenda resmi kawasan. ([ASEAN](#))

9. Fragmentasi geoekonomi

Pecahnya keterhubungan ekonomi global akibat tarif, sanksi, konflik kepentingan, dan penataan ulang rantai pasok. Dalam konteks kawasan, gejala ini mendorong ASEAN membahas ketahanan ekonomi regional secara lebih serius. ([ASEAN](#))

10. Global South

Kelompok luas negara berkembang yang berupaya memperbesar pengaruhnya dalam tata kelola global dan menuntut sistem internasional yang lebih representatif. Keanggotaan Indonesia di BRICS pada 2025 secara resmi dikaitkan dengan penguatan suara negara-negara berkembang dan kerja sama Selatan–Selatan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

11. BRICS

Kelompok negara berkembang besar yang kini juga menjadi forum politik-ekonomi bagi reformasi tata kelola global dan kerja sama Global South. Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

12. Ketahanan nasional

Kemampuan negara menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan daya tahan institusional terhadap tekanan eksternal maupun internal. Dalam kerangka Kemlu 2025–2029, diplomasi Indonesia diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional secara langsung. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

13. Ketahanan ekonomi

Kemampuan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh dan stabil di tengah guncangan global seperti konflik, volatilitas harga energi, atau pelemahan perdagangan. BPS dan Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia tetap cukup tangguh pada 2025, meskipun tantangan eksternal membesar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

14. Keamanan maritim

Perlindungan jalur pelayaran, perairan nasional, aktivitas ekonomi laut, dan kepentingan strategis di ruang maritim. Pada Januari 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa keamanan maritim dan keselamatan jalur laut menjadi prioritas yang akan diperkuat. ([Reuters](#))

15. Hedging

Strategi menjaga hubungan dengan beberapa kekuatan besar sekaligus tanpa sepenuhnya berpihak pada salah satu dari mereka, guna mempertahankan fleksibilitas dan mengurangi risiko. Dalam praktiknya, pola ini tercermin dalam hubungan Indonesia yang simultan dengan ASEAN, BRICS, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Indo-Pasifik lainnya. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

16. Rantai pasok strategis

Jaringan produksi dan distribusi lintas negara yang penting bagi industri, perdagangan, dan keamanan ekonomi. Dalam konteks geopolitik kontemporer, rantai pasok menjadi arena pengaruh dan negosiasi, terutama pada mineral kritis, energi, dan ekonomi digital. ([ASEAN](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025, August 13). *ASEAN Geoeconomics Task Force convenes to address geoeconomic tensions and unilateral tariff policies*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Brasil. Presidência da República. (2025, January 9). *Brazil announces Indonesia as full member of BRICS*. Governo do Brasil. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2025–2029*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Reuters. (2025, January 10). *Indonesia to intensify defence partnerships and maritime security, top diplomat says*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 9). *Indonesia says it has entered agreement with India to procure BrahMos missiles*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 12). *Indonesia and Australia to expand security cooperation to include Japan, Papua New Guinea*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 13). *Indonesia minister says sustained high oil prices could see budget deficit breach mandated limit*. Reuters. ([Financial Times](#))

World Bank. (2025, December 16). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 14 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69b363a2-f8c0-839c-9567-4273c1136a9a>